

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun

Oleh :

Jefri Alfin Sinaga¹, Elidawaty Purba², Pawan Darasa Panjaitan³

Alfin.sinaga@gmail.com¹, elidawatypurba@usi.ac.id², darwin.damanik@gmail.com³

Universitas Simalungun

ABSTRAK

Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah. Desentralisasi merupakan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan akurat terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik yang terdapat pada masing - masing daerah. Selain sebagai tujuan pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator pencapaian pembangunan nasional. Desentralisasi akan memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan - kebijakan dan rencana keuangan sendiri, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah berdasarkan UU NO. 22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, yang mana daerah provinsi dengan kedudukan sebagai sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang di delegasi kepada gubernur. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa desentralisasi dan dekonsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun nilai $t_{hitung} -0,155 < t_{tabel} 1.942$ Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan nilai t : diketahui nilai $t_{hitung} -1.131 < t_{tabel} 1.942$ sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana, Pertumbuhan Ekonomi, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Utara. Suku Batak Simalungun merupakan penduduk asli dari kabupaten ini. Ibu Kota Kabupaten ini telah berpindah ke Raya tanggal 23 Juni 2008 dari Kota Pematangsiantar yang telah menjadi daerah otonomi, setelah tertunda selama beberapa waktu. Simalungun letaknya diapit 8 Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, Tobasa, Samosir, Asahan, Batu Bara, dan Kota Pematangsiantar.

Letak astronomisnya antara $02^{\circ}36' - 03^{\circ}18'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}32' - 99^{\circ}35'$ Bujur Timur dengan luas $4.386,60 \text{ km}^2$ berada pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut dimana 75% lahan berada pada kemiringan 0-15% sehingga Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ke-3 setelah

Kabupaten Madina dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di Kawasan wisata Danau Toba. Kabupaten Simalungun terdiri dari 31 Kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Raya sedangkan terkecil adalah Kecamatan Haranggaol Horisan (BPS Kabupaten Simalungun 2016). Potensi ekonomi Kabupaten Simalungun sebagian besar terletak pada produksi pertaniannya. Produksi lainnya adalah hasil industri pengelolaan dan jasa. Kabupaten Simalungun penghasil padi, jagung, ubi kayu terbesar di Sumatera Utara.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah di dasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-

sumber pendapatan daerah lainnya antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari pendanaan yang diberikan pemerintah daerah sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. Dana - dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda - beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dua tenaga kerja yang berbeda antar daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan bergantung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi yang menciptakan perguliran dana untuk pembanguana daerah yang berkelanjutan mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan daerah.

Alasan pemilihan judul yaitu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut bagai mana hubungan PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Sehingga berdasarkan dari latar belakang di atas, diharapkan suatu daerah dapat mengoptimalkan komponen - komponen dan kemampuan yang dimiliki sehingga pelaksanaan desentralisasifiskal melalui, dana perimbangan dari pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah maka judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun.**

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Satu – satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDR Buntuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Pengertian PDRB adalah penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh setiap kegiatan / lapangan usaha.

Dalam penghitungan PDRB ,mempergunakan seluruh lapangan usaha dikelompokkan menjadi sembilan sektor ekonomi. Hal ini sesuai dengan pembagian yang digunakan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) ditingkat nasional. Ini juga memudahkan analisis untuk membandingkan PDRB antar provinsi dan antara PDRB dengan PDB.

Metode perhitungan PDRB yaitu :

1. Metode Langsung, dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*)
2. Metode Tidak Langsung, dilakukan dengan dua cara perhitungan, yakni Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku, merupakan jumlah seluruh NTB atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit – unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan Nilai Produksi Bruto (NPB) dengan biaya antara masing - masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume / kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing - masing kegiatan, sub sektor, dan sektor. Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan, dapat mencerminkan perkembangan realekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi. NTB atas harga konstan ini hanya menggambarkan perubahan volume / kuantum produksi saja. Perhitungan atas dasar harga konstan ini berguna untuk melihat perubahan ekonomi secara keseluruhan maupun secara sektoral. PDRB harga konstan juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu kota di provinsi dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan PDRB harga konstan sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi.

Terdapat factor – faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan dukungan pembanguana. Dalam pemerintah daerah pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada

pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Sukirno (2007: 103) pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dari ciri - ciri penting dalam suatu masyarakat yaitu : perubahan dalam system politiknya, struktur sosialnya, nilai nilai masyarakatnya, dan struktur kegiatan ekonominya. Menurut Jhingan (2018:67), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam factor yaitu factor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang termasuk dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Faktor non ekonomi adalah lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 157 UU No.32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*) Mardiasmo (2018: 104). PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha – usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

PAD terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain - lain PAD yang sah. PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, DAK, dan DBH, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2004) dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Pada dasarnya terdapat dua jenis grant yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu: (1) *block grant* (DAU), dan (2) *specific grant* (DAK). Dalam rangka meningkatkan *local discretion, grant* yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat *block grant*, bukan *specific grant*.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang – undang No. 33 Tahun 2004, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK adalah dana bantuan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu/khusus.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik pendukung. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan public

Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti pemerintah. Otonomi mempunyai arti memerintah sendiri, dalam wacana administrasi public daerah sering disebut sebagai *local self government*. Suparmoko (2016: 5), pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid yang sesungguhnya mewarisi system tersebut dari rezim sebelumnya. Dalam pemerintahan mantan presiden Habibie telah diperkenalkan UU. No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah. Perkembangan ekonomi berikutnya semakin menuntut untuk segera dilaksanakannya Undang - Undang tersebut

Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, bermakna sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu unsur reformasi adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota, tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, investasi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendukung proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah Mardiasmo (2018: 5). Arah dan *statutory requirement* (persyaratan hukum) yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

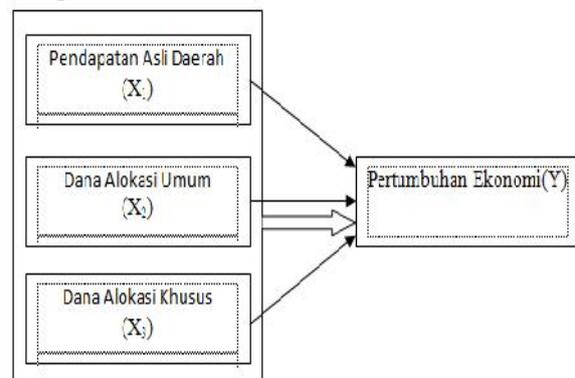
Menurut Suparmoko (2016: 19), keuntungan dari system otonomi daerah bahwa pemerintah daerah akan bekerja lebih efisien dari pada pemerintah pusat, ada sebagian kegiatan yang lebih efisien bila dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan ada kegiatan lain yang lebih efisien bila dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam menentukan kegiatan macam apa yang sebaiknya diserahkan kepada pemerintah pusat dan kegiatan apa pula yang seyogyanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam

hal dal tertentu pemerintah daerah akan kurang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang ada. Sebagai missal bila pemerintah daerah diminta untuk menyediakan barang public nasional seperti pertahanan dan keamanan nasional, masalah pemerintahan menghasilkan (retribusi penghasilan) dan pemecahan masalah ekonomi makro, tentu hasilnya tidak akan memuaskan Sukirno (2016: 21).

Menurut Suparmoko (2016: 21), otonomi daerah yang mencakup dua macam undang-undang yaitu Undang - undang No. 22, Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - undang No. 25, Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan undang- undang otonomi daerah itu berarti bahwa ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi disbanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi

Kerangka Pemikiran

Adapun Kerangka Pemikiran dapat digambarkan hubungan variabel independent dan dependen sebagai berikut:



Gambar: III.1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

$X_1 \longrightarrow$ = Pengaruh PAD (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) secara individual (parsial)

$X_2 \longrightarrow$ = Pengaruh DAU (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomu (Y) secara individual (parsial).

$X_3 \longrightarrow$ = Pengaruh DAK (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) secara individual (parsial)

$Y \longleftarrow$ = Pengaruh PAD (X_1), DAU (X_2), dan DAK (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) secara simultan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau

populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain. Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis dapat memperoleh gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan memperoleh data serta informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Lokasi penelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan penulis sebuah hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simalungun di bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Bupati Simalungun, Jl. Saribu Dolok, Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Ada pun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2019.

Menurut Arikunto (2006: 130), "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian". Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat ditarik disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis, penelitian ini populasi yang digunakan adalah data PAD, DAU, dan DAK di Kabupaten Simalngun pada 10 Tahun terakhir.

Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan. Di mana data data yang di kumpulkan bersumber dari Dindas Pendapatan Kabupaten Simalungun, jurnal, laporan tahunan dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun. Data berbentuk data berkala (*time series*) dengan periode dari Tahun 2009 – 2018 (10 tahun). Sehingga hasil penelitian ini merupakan hasil penggunaan data selama periode tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pendapatan Asli Kabupaten Simalungun

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Terdapat sumber penerimaan yang menjadi penopang dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun Tahun 2009-2018 yang disajikan dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 4. 1

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dimalungun 2009-2018

No	Tahun	PAD (miliar)	Pertumbuhan (%)
1.	2009	35.371.358.862	0,15
2.	2010	45.365.738.664	0,28
3.	2011	42.501.670.861	0,06
4.	2012	61.273.486.225	0,44
5.	2013	97.818.886.359	0,59
6.	2014	96.825.645.673	0,10
7.	2015	111.893.282.770	1,55
8.	2016	119.980.274.421	0,07
9.	2017	213.789.585.859	0,78
10.	2018	340.500.000.000	0,59

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun 2019.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun tidak selalu terjadi peningkatan per tahunnya.



Dana Alokasi Umum Kabupaten Simalungun

Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi / Kabupaten / Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Adapun anggaran Dana Alokasi Umum pada Kabupaten Simalungun mulai dari 2009 - 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Dana Alokasi Umum Kabupaten Simalungun 2009-2018

No.	Tahun	DAU (rupiah)	Pertumbuhan (%)
1.	2009	63.4431.886	-0,008
2.	2010	644.692.826	0,01
3.	2011	696.256.863	0,07
4.	2012	865.433.541	0,24
5.	2013	978.871.962	0,13
6.	2014	1.007.985.764	0,02
7.	2015	1.084.973.726	0,07
8.	2016	1.230.816.187	0,13
9.	2017	1.297.673.726	0,05

10.	2018	1.686.885.959	0,29
-----	------	---------------	------

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Dana Alokas Umum (DAU) di Kabupaten Simalungun selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Simalungun Tabel 4.3

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Simalungun 2009-2018

No.	Tahun	DAK (rupiah)	Pertumbuhan
1.	2009	77.586.362	-0,03
2.	2010	62.175.201	-0,19
3.	2011	73.972.893	0,18
4.	2012	90.913.648	0,22
5.	2013	80.866.415	-0,11
6.	2014	98.667.381	0,22
7.	2015	123.037.700	0,24
8.	2016	141.590.270	0,15
9.	1017	133.885.671	-0,05
10.	2018	154.423.756	0,15

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Simalungun tidak selalu terjadi peningkatan per tahunnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode grafik P - Plot normal. Dari hasil grafik dapat dilihat apakah persebaran data penelitian memiliki seberapa data yang normal atau tidak. Sebaran data dikatakan normal apabila sebaran titik-titik mengikuti garis diagonal atau mendekati garis diagonal..

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas untuk mendeteksi apakah model regresi yang dipakaibebas dari masalah multikolinearitas dilihat dari besaran VIF dan *tolerance* yang menunjukkan bahwa pada variabel PAD, DAU, dan memiliki VIF < 10 denga nilai *tolerance* > 0,1.

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PAD	.075	13.383
DAU	.031	32.341
DAK	.096	10.415

a. Dependent Variable: PE

Berasarkan diatas bagian koefisien yang terdapat di output dapat dilihat bahwa :

1. Toletansi PAD (X_1) = 0,075 sedangkan VIF pada PAD (X_1) = 13.383. Hal ini menunjukkan bahwa VIF dan Toleransi mempunyai nilai diatas < 0,1 dan tidak lebih dari > 10, yang berarti terdapat permasalahan multikolinearitas.
2. Toleransi DAU (X_2) = 0,031 sedangkan VIF pada DAU (X_2) = 32.341. Hal ini menunjukkan bahwa VIF dan toleransi mempunyai nilai diatas < 0,1 dan tidak lebih dari > 10, yang berarti terdapat permasalahan multikolinearitas.
3. DAK(X_3) = 0,096 sedangkan VIF pada DAK (X_3) = 10.415. Hal ini menunjukkan bahwa VIF dan toleransi mempunyai nilai diatas < 0,1 dan tidak lebih dari > 10, yang berarti terdapat permasalahan multikolinearitas

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.951 ^a	.924	.886	2528953.30302	2.153

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

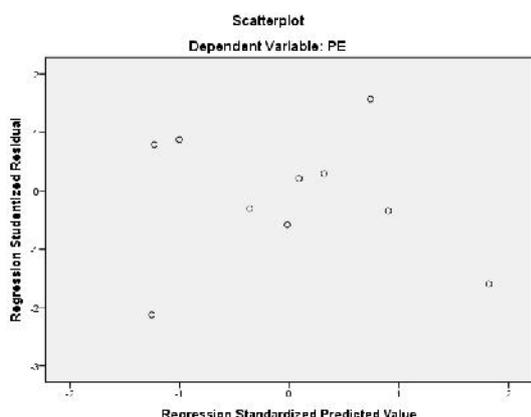
Berdasarkan dari Tabel 4.5 diperoleh hasil *Durbin Waston Test* sebesar 2.153 hal ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif, artinya tidak ada keputusan dengan range dL dw du atau 1,20002 2.153 27998 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* atau *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk enguji Heteroskedastisitas dengan uji Scatter Plot.

1. Uji ini dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada scatter plot regresi.

2. Jika titik - titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah Heterokedastisitas.



Pada gambar Scatter Plot terlihat bahwa titik - titik menyebar secara acak (random) serta tersebar baik di atas maupun diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disampaikan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda ialah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait antara dua atau lebih variabel independent (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). analisis ini mengetahui arah hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independent berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan

Tabel 4.6. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3150525.438	5454118.390		-.578	.585
PAD	-.3685E-005	.000	-.466	-1.131	.301
DAU	.033	.014	1.447	2.258	.065
DAK	-.013	.085	-.056	-.155	.882

a. Dependent Variable: PE

Menurut hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4.6 maka dapat disusun persamaan regresi yaitu:

$$Y = -3150525.438 - 3.685E-005X_1 + 0.033X_2 - 0.013X_3 + e$$

Dari hasil estimasi diatas dijelaskan bahwa pengaruh variabel-variabel bebas yaitu PAD, DAU, dan DAK variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

- $\beta_0 = -3150525.438$
Konstanta regresi ini menunjukkan apabilavariabelpendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dianggap tetap atau konstan maka PDRB harga konstan senilai Rp. -3150525.438
- $\beta_1 = -3.685E-005$
Terdapat hubungan positif pendapatan terhadap PAD. Jika terjadi peningkatan pada pendapatan sebesar Rp. -3.68 maka PDRB harga konstan senilaiRp. -3.685E-005
- $\beta_2 = 0,033$
Terdapat hubungan positif pendapatan terhadap DAU. Jika terjadi peningkatan pada pendapatan sebesar Rp. 0,03 maka PDRB harga konstan senilaiRp. 0,033.
- $\beta_3 = 0,013$
Terdapat hubungan positif pendapatan terhadap DAK. Jika terjadi peningkatan pada pendapatan sebesar Rp. 0,01 maka PDRB harga konstan senilaiRp. 0,013.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variable - variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama - sama). Variabel independent dikatakan mempengaruhi variabel dependen secara Bersama - sama jika nilai Signifikansi F yang didapat lebih lebih kecil dari tarif signifikan 0,05, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait.

Tabel 4.7 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	465327787611889.400	3	155109262537296.470	24.252	.001 ^b
1 Residual	38373932328207.480	6	6395655388034.579		
Total	503701719940096.900	9			

a. Dependent Variable: PE

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 0%, $\alpha = 0\%$, df 1 dapat ditentukan dengan persamaan berikut :df = 1 jumlah variabel ; artinya df1 = 4 sedangkan df2 =n - k; artinya df2 = 10 - 4 = 6 jadi, dapat dicari pada program *Microsoft Excel* dengan cara mengetik pada cell kosong = FINV

(0,05;4;6) lalu tekan enter. Hasilnya adalah 4,533677 (4,533).

Analisa dan Pembahasan

1. Factor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Simalungun adalah dana alokasi umum.
2. Hasil pengujian dengan SPSS untuk Uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan maka berdasarkan hasil pengelolaan sesuai dengan hipotesis yang ada, tetapi pada variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak signifikan maka berdasarkan hasil pengelolaan sesuai dengan hipotesis yang ada.
3. Berdasarkan Uji t variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun dengan nilai t_{hitung} 2.250 dan nilai signifikansi 0,65 dengan menggunakan signifikansi 5%.
4. Hasil pengujian dengan SPSS untuk Uji F menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi.
5. Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun nilai t_{hitung} -1.131 > t_{tabel} 1.942 Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi semakin menurun.
7. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun nilai t_{hitung} 2.258 < t_{tabel} 1.942 Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi semakin rendah.
8. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun nilai t_{hitung} - 0,155 < t_{tabel} 1.942 Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi semakin rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai t: diketahui nilai t_{hitung} - 1.131 < t_{tabel} 1.942 sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).
2. Berdasarkan nilai t: diketahui nilai t_{hitung} 2.258 > t_{tabel} 1.942 sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).
3. Berdasarkan nilai t: diketahui nilai t_{hitung} - 0,155 < t_{tabel} 1.942 sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).
4. Berdasarkan pengujian statistik dengan metode Uji F, dimana tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil yakni 0,001 dari standar signifikansi yakni 5% atau 0,05 dan perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} dimana F_{hitung} sebesar 24.252 lebih besar dari F_{tabel} yakni 4,533, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Berdasarkan pengujian Koefisien Determinasi (R^2) pada penelitian ini sebesar 92,4% hal ini diartikan bahwa sebanyak 92,4% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sisanya 7,6% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang diberikan penulis adalah:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber pendapatan

DOI : 10.36985/ekuilmomi.v2i1.65

- asli daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah juga diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan baik untuk meningkatkan pelayanan publik dengan baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kecamatan khususnya selain di Kabupaten Simalungun supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
 3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto,S. (2006).*Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori - Teori Pembangunan Ekonomi ;Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Amalia, Lia. 2007. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Aminah, E.N., 2017. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Gitosudarmo, Indriyo., dan Basri. 2002. Manajemen Keuangan Edisi 4. Yogyakarta : BPF
- Sjafrizal.2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi : Rajawali Pers.
- Tarigan, Robinson. 2012. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta :PT. Bumi Aksara